ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.224/Pdt.G/2011/PTA. Smg. Tentang Cerai Talak ". penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kekuatan yuridis putusan Pengadilan Agama Purworejo dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Data penelitian dihimpun dengan melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif - komparatif.

Hasil penelitian disini menyimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ditambah kesaksian dan keterangan tambahan pemohon dan termohon yang pada intinya rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan pemohon tidak lagi mendapatkan kepuasan dari termohon dalam hubungan badan dan hakim Pengadilan Agama Purworejo mengabulkan permohonan cerai pemohon. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingggi Agama Semarang, hakim berpendapat lain, yang pada intinya posita dalam permohonan pemohon di Pengadilan Agama itu obscuur libel (kabur/tidak jelas) karena dalam posita pemohon keduanya tidak harmonis dan pisah tempat tinggal, akan tetapi bukti tulis P-1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) dan alamat yang digunakan pemohon pada surat permohonan cerai talaknya itu masih satu alamat dengan alamat tinggal termohon sehingga fakta peristiwanya menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purworejo. Kekuatan yuridis putusan Pengadilan Agama Purworejo yang mengabulkan permohonan cerai pemohon ini mempunyai kekuatan mengikat, akan tetapi sebelum masa tenggang suatu putusan itu habis dan mempunyai kekuatan tetap termohon mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan putusan Pengadilan Agama Purworejo dibatalkan. Dalam hal pertimbangan hukum penulis lebih condong pada pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pemegang putusan oleh Pengadilan Agama disarankan: *Pertama,* Bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara tidak harus terpaku pada permohonan pemohon yang diajukan atau bahkan memihak sebelah (adil). *Kedua,* Hakim harus mempertimbangkan juga aspek mashlahat yang akan diterima oleh suami istri dan juga harus benar-benar membawa kepada kabaikan bagi pasangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id